

SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI DI KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI TIMUR



DISUSUN OLEH:

RAMLAN TAHA

E051 191 016

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK

SAPI DI KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI TIMUR

Disusun dan diajukan oleh :

RAMLAN TAHA

E051191016

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin dan dinyatakan telah memenuhi

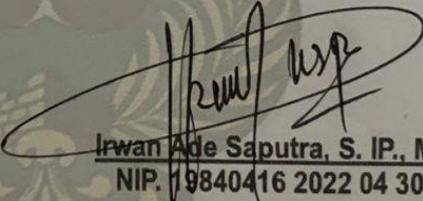
syarat kelulusan

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

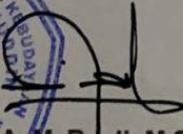

Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si
NIP. 19601123 1986 03 2001


Irwan Ade Saputra, S. IP., M. Si
NIP. 19840416 2022 04 3001

Mengetahui,

**Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin**




Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 1001

LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK
SAPI DI KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI TIMUR

Disusun Oleh :

RAMLAN TAHA

E051191016

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian Skripsi
pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

Makassar, 6 November 2023

Menyetujui :

PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si
Sekretaris : Irwan Ade Saputra, S. IP., M. Si
Anggota : Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M. Si.
Anggota : Saharuddin, S. IP., M. Si.

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rabina Yunus, M. Si

Pembimbing Pendamping : Irwan Ade Saputra, S. IP., M. Si

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramlan Taha

NIM : E051191016

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN PADA TERNAK SAPI DI KABUPATEN SINJAI KECAMATAN SINJAI TIMUR"** Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi saya ini hanya karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 06 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Ramlan Taha

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi inidengan judul **“Implementasi Kebijakan Program Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur”** sebagai salah satu syarat untukmemperoleh gelar sarjana pada Program Sarjana Ilmu Pemerintahan FakultasIlmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, maka besar harapan bahwa skripsi ini dapat diterima dengan baik dan memenuhi kriteria.

Skripsi ini merupakan hasil dari upaya dan dedikasi penulis dalam mengeksplorasi suatu topik yang memiliki relevansi yang signifikan dalam bidang ilmu pemerintahan. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam kesempatan ini, peneliti akan menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pembuatan skripsi ini dikarenakan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari banyak pihak, skripsiini tidak akan terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih yang terkhusus untuk orang tua, ibu Sitti Hafsah Musa dan bapak Muh. Tahang Sakka yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa, serta kasih sayang

yang tidak henti-hentinya sehingga mengantarkan saya untuk mencapai pendidikan setinggi-tingginya pada Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Dan seluruh saudara peneliti. Selanjutnya, kepada Ibu Prof. Dr. Hj Rabina Yunus, M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Irwan Ade Saputra, S. IP. M.Si. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta bantuan dari awal penyusunan hingga pada penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah dalam melakukan inseminasi buatan ternak sapi dan referensi untuk Ilmu Pemerintahan di Universitas Hasanuddin.

Melalui kesempatan ini, peneliti juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Dr. A.M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Para tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, (Alm)

Prof Dr.A.Gau Kadir, MA, Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Prof. Dr. Rabina Yunus,M.Si, Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, (Alm) Dr. H. Andi Syamsu Alam,M.Si, Dr. H. A.M. Rusli, M.Si, Suhardiman Syamsu, M.Si, Dr. Jayadi Nas, M.Si,. Irwan Ade Saputra, S. IP. M.Si. Andi Lukman Irwan, S.IP, M.Si, Rahmatullah, S.IP, M.SI, Ashar Prawitno, S.IP, M.Si, Saharuddin, S.IP, M.Si, yang telah memberikan pengetahuan dalam jenjang perkuliahan sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;

6. Para pegawai dan staf akademik Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuan kepada peneliti;
7. Para informan dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan baik menerima dan memberikan bantuan berupa perizinan untuk melakukan pengumpulan data dan melakukan wawancara. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (Himapem) sebagai rumah kedua peneliti yang telah memberikan pengalaman berorganisasi, dan bersosial di kehidupan kampus dengan rasa kekeluargaan yang erat beridentitaskan Merdeka Militan;
8. Seluruh teman-teman “ZEITGEIST 2019” yang telah menjadi teman terdekat peneliti selama berada dikampus Andes, Ilham, Zaky, Wahyu bos, Viko, Edli, Firga, Aldian, Indah A, Venike, Umi Kalsum, Amirul, Andry,Lili Ling, Adam, Lala, Nunu, Umi Rahayu, Fajri, Vira, Stevany, Inna, Puput,Ibnu, Bunda Ila, Febrin, Okta, Pute, Mapparessa, Tisa,

Nisa, Eki, Indah P, Ulfi, Elisa, Diah, Hafiqi, Rafly, Asrul;

9. Teman–teman angkatan 2019 S1 Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
10. Seluruh teman - teman Warga Sipil yang tidak sempat peneliti sebutkan satu persatu;
11. Keluarga besar Bolbar Family yang telah banyak memberikan maknakebersamaan;
12. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Universitas Hasanuddin Gelombang 108 Kecamatan nuha Kabupaten Luwu Timur
13. Teman - teman scooterist pembangkang Sinjai yang telah banyak memberikan makna persaudaraan;

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, September 2023

Ramlan Taha
NIM : E051191016

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	2
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	7
DAFTAR TABEL.....	10
DAFTAR GAMBAR.....	11
ABSTRAK	12
<i>ABSTRACT</i>	13
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
13.1 Latar Belakang	1
13.2 Rumusan Masalah.....	7
13.3 Tujuan Penelitian.....	8
13.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Peran Pemerintah Daerah.....	10
2.1.1 Peran.....	10
2.1.2 Pemerintah Daerah	12
2.2 Implementasi Kebijakan Program Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur	16
2.2.1 Implementasi.....	16
2.2.2 Kebijakan	18
2.2.3 Program	19
2.2.4 Inseminasi buatan.....	19
2.3 Kerangka Konsep	25
BAB III	26
METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Pendekatan dan Strategi Penelitian.....	26
3.2 Lokasi Penelitian	28

3.3	Fokus Penelitian.....	29
3.4	Sumber Data	31
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6	Teknik Analisis Data	33
BAB IV	35
HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1	Deskripsi Lokasi Penelitian.....	35
4.1.1	Gambaran umum Kabupaten Sinjai	35
4.1.2	Gambaran umum Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.....	36
4.2	Hasil dan Pembahasan Penelitian	44
4.2.1	Peran Dinas Peternakan Kabupaten Sinjai Dalam program inseminasi buatan di kabupaten sinjai	45
4.2.2	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan inseminasi buatan.....	84
BAB V	96
KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1	Kesimpulan	96
5.2	Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	102
	Lampiran Dokumentasi Wawancara	102
	Lampiran Kebijakan Dan Peraturan Yang Digunakan	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan (IB) Di Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023	6
Tabel 1. 2 Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan (IB) Di Kabupaten .	7
Tabel 4.1. 1 Batas Wilayah Kabupaten Sinjai	35
Tabel 4.2.1 Jumlah sapi potong di Kecamatan Sinjai Timur	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2. 1 Model David C. Korten	23
Gambar 4.1. 1 Struktur Organisasi dan Susunan Personil	41

ABSTRAK

Ramlan Taha, Nomor Induk Mahasiswa E051191016, Program studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Program Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur”, di bawah bimbingan Prof. Dr. Hj Rabina Yunus, M.Si sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si. sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dinas peternakan Kabupaten Sinjai dalam implementasi kebijakan program inseminasi buatan pada ternak sapi dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program inseminasi buatan pada ternak sapi.

Inseminasi buatan (IB) merupakan suatu rangkaian proses terencana dan terprogram yang menyangkut kualitas genetik ternak dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan IB dan faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan inseminasi buatan pada ternak sapi di kabupaten sinjai kecamatan sinjai timur. Jenis penelitian yang dilaksanakan yaitu penelitian kualitatif dan untuk pengumpulan dan pengambilan data pelaksanaan diambil dari dinas peternakan kabupaten sinjai dan juga masyarakat yang ada di kabupaten sinjai kecamatan sinjai timur yang menggunakan kuisisioner.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan inseminasi buatan di kabupaten sinjai kecamatan sinjai timur, terdiri dari tingkat pengetahuan pelaku inseminasi buatan, pengetahuan keunggulan inseminasi buatan, pengetahuan tentang kapan ternak dikawinkan, sedangkan faktor petugas inseminasi buatan seluruh faktor saling mempengaruhi terhadap keberhasilan inseminasi buatan di kabupaten sinjai kecamatan sinjai timur.

Kata kunci : Insemensi buatan, Ternak sapi, Kabupaten Sinjai

ABSTRACT

Ramlan Taha, Student Identification Number E051191016, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Thesis entitled "Implementation of Artificial Insemination Program Policy in Cattle in Sinjai District, East Sinjai District", under the guidance of Prof. Dr. Hj Rabina Yunus, M.Si as Main Supervisor and Mr. Irwan Ade Saputra, S.IP., M.Si. as a Co-Guide.

This study aims to determine how the role of the Sinjai District livestock office in the implementation of the artificial insemination program policy in cattle and what are the factors that influence the implementation of the artificial insemination program policy in cattle.

Artificial insemination (IB) is a series of planned and programmed processes that concern the genetic quality of livestock in the future. This study aims to determine the success rate of IB and factors that influence the success of artificial insemination in cattle in Sinjai District, East Sinjai District. The type of research carried out is qualitative research and for the collection and collection of implementation data taken from the Sinjai District Livestock Office and also the community in Sinjai District, East Sinjai District who use questionnaires.

The results of the study can be concluded that the success of artificial insemination in Sinjai District, East Sinjai District, consists of the level of knowledge of artificial insemination actors, knowledge of the advantages of artificial insemination, knowledge of when cattle are mated, while the factors of artificial insemination officers all factors influence each other on the success of artificial insemination in Sinjai District, East Sinjai District.

Keywords : Artificial insemency, Cattle, Sinjai District

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, inseminasi buatan atau disingkat IB, telah menjadi program nasional sejak tahun 1974 dan telah banyak dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta. Namun, implementasi kebijakan IB masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan peternak, terutama di daerah pedesaan. Selain itu, akses yang terbatas terhadap teknologi reproduksi dan kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dan lokal juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan IB.

Inseminasi buatan ini merupakan suatu bioteknologi reproduksi yang secara luas telah dikenal dunia yang menggunakan teknologi koleksi semen, prosesing dan menempatkan spermatozoa pada alat reproduksi betina untuk memfertilisasi oosit. Sehingga dapat dikatakan suatu baypass penempatan semen tanpa terjadinya perkawinan secara alami. Sifat-sifat genetic penting tergantung pada spesiesnya misalnya sapi potong pada tingkat produksi otot, produksi susu, kemampuan kerja, dan konformasi tubuh yang benar.

Balai Inseminasi Buatan yang tertua di Indonesia dan masih bertahan sampai sekarang adalah Balai Inseminasi Buatan Ungaran, yang beralamat di Jawa Tengah. Berdirinya Balai IB Ungaran ini menjadi

cikal bakal perkembangan IB sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Pada awalnya kegiatan pelayanan IB hanya berkisar di sekitar Ungaran, tetapi seiring berjalannya waktu perkembangan IB meliputi daerah-daerah di sepanjang jalur susu Semarang hingga Solo dan Tegal. Perkembangan IB yang pesat ini didukung oleh penggunaan semen beku, sehingga IB di Jawa Tengah tidak terbatas pada sapi perah tetapi juga sapi potong.

Selanjutnya pada tahun 1969, IB mulai diperkenalkan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Fakultas Kedokteran Hewan IPB melalui Departemen Fisiopatologi reproduksi telah mengintrodusir IB di daerah Pengalengan Bandung Selatan dengan "*calf show*" yang pertama kali dalam sejarah perkembangan IB di Indonesia.

Penggunaan semen beku di Indonesia dimulai pada tahun 1973, hal ini telah membantu menggalakkan IB. Semen beku telah digunakan dalam IB pada sapi perah maupun sapi potong. Dalam usaha memperkenalkan penggunaan semen beku dalam IB dan menyebarkan bibit-bibit unggul sapi potong ke daerah Indonesia Timur maka dilaksanakan kursus maka didirikan pusat IB di Sulawesi Selatan (ujung Pandang) dan NTT (Kupang). Kemudian diperkenalkan pula IB di Sulawesi Tenggara, bahkan dalam perkembangan selanjutnya, Direktorat Bina Produksi, Direktorat Jenderal Peternakan

Departemen Pertanian, teknik IB telah diterapkan di 13 Propinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT,

Sulawesi selatan dan Kalimantan Selatan.

Hasil IB di Jawa yang dilaksanakan sejak 1972-1974 kemudian dilakukan survey evaluasi kegiatan IB sapi tersebut oleh Direktorat Jenderal Peternakan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Hewan IPB dan Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran Bandung. Hasilnya adalah persentase konsepsi yang dicapai selama 2 tahun terakhir khususnya dengan semen beku masih sangat rendah yaitu 21,30-38,92% untuk inseminasi pertama dibandingkan dengan 60-70% di negara- negara maju. Hasil tersebut menyimpulkan bahwa titik berat ketidakberesan tidak terletak pada kualitas semen (bibit) pejantan, tidakjuga pada keterampilan peternak atau inseminator melainkan sebagian besar terletak pada ketidaksuburan ternak-ternak betina itu sendiri. Yang banyak digunakan dalam pengembangan peternakan modern diindonesia. Metode ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah populasi ternak demi terjuwudnya swasembada daging nasional, dengan memanfaatkan teknologi reproduksi.

Inseminasi buatan dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas ternak. IB merupakan teknik reproduksi ternak yang dilakukan dengan memasukkan sperma yang telah diambil dari pejantan ternak secara buatan ke dalam saluran reproduksi betina. Teknik IB ini bertujuan untuk meningkatkan produksi daging dan juga untuk mendapatkan keturunan yang berkualitas lebih baik dari ternak lokal. Kekuatan inseminasi ini sebagai pendorong secara komersial untuk

menyebarkan bibit unggul yang mempunyai prestasi genetik yang baik ke peternak atau industri peternakan dengan harga terjangkau.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi peternakan yang cukup besar, dan telah menerapkan sistem IB pada ternak sapi. Namun, masih banyak peternak di kabupaten Sinjai yang belum memanfaatkan teknik IB dalam program pembiakan ternak mereka.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diketahui lebih jelas mengenai kondisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan teknik IB di kabupaten Sinjai tidak secara merata dalam program implementasinya. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi penerapan teknik IB adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman peternak mengenai teknik IB, ketersediaan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk melakukan IB, dan juga dukungan dari pihak pemerintah dan institusi terkait dalam menyediakan fasilitas dan bantuan teknis untuk menerapkan IB. Namun fokus pada penelitian ini adalah bagaimana pengaruh penerapan kebijakan pemerintah kabupaten sinjai terhadap minat peternak agar ingin melakukan inseminasi buatan pada ternak sapi di kabupaten sinjai.

Inseminasi buatan di Kabupaten Sinjai telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas hewan ternak di daerah tersebut. Berdasarkan informasi yang diberitakan media Pada Tahun 2020 lalu, realisasi pelaksanaan IB itu sebanyak 6.341 dari jumlah akseptor sebanyak 5.073 kemudian jumlah

kelahiran 2.661. Sementara target pada tahun 2021 8.300 ekor, realisasinya saat ini sudah 3.175, kemudian realisasi kelahiran sebanyak 1.062,”.

Sejumlah penelitian telah dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapan teknologi IB di Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi IB dapat meningkatkan efisiensi reproduksi ternak sapi, sehingga dapat meningkatkan populasi sapi dengan cepat dan efisien. Selain itu, teknologi IB juga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas sapi potong, yang dapat meningkatkan pendapatan peternak.

Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakandan Kesehatan Hewan Bab IV pasal 13 ayat (6) Setiap benih atau bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya dan ayat(6), Sertifikat benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Benih atau Bibit yang terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri.

Konsep inseminasi buatan sangat penting untuk dilakukan agar meningkatkan produksi daging, untuk itu dikeluarkan peraturan menteri nomor 42 tahun 2014 tentang pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit ternak. Adapun aturan serupa ditingkat Kabupaten Sinjaiperaturan daerah yang mengatur tentang inseminasi buatan yaitu Perdanomor 77 tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan

fungsi serta tata kerja dinas peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten Sinjai dijelaskan pada BAB III pasal 9 ayat 2 poin J, menyusun petunjuk teknis pengolahan perbibitan ternak ruminansia, pelaksanaan inseminasi buatan dan penyebaran pejantan unggul.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam penerapan teknologi IB di Kabupaten Sinjai, seperti tidak meratanya pengetahuan tentang inseminasi buatan di Kabupaten Sinjai yang mengakibatkan kelahiran ternak hasil IB rendah sesuai data yang dicantumkan dibawahini, data tersebut bersumber dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai.

Tabel 1. 1 Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan (IB) Di Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

NO	KECAMATAN	IB (Dosis)	AKSEPTOR (Ekor)	PKB (Ekor)			LAHIR (Ekor)		
				IB	KA	TOTAL	IB	KA	TOTAL
1	Sinjai Utara	0	0	135	162	297	99	10	109
2	Sinjai Timur	1,117	835	642	140	782	280	183	463
3	Sinjai Selatan	457	412	417	1194	1611	208	1,337	1545
4	Sinjai Borong	1,475	1,146	313	42	355	165	29	194
5	Sinjai Tengah	189	151	503	141	644	448	92	540
6	Tellulimpoe	IB	AKSP	879	27	906	503	464	967
7	Bulupoddo	0	0	0	0	0	102	15	117
8	Sinjai Barat	727	594	726	67	793	872	190	1062
TOTAL		3965	3138	3615	1773	5388	2677	2320	4997

Sumber : Dinas Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023

Berdasarkan tabel 1.1, penerapan program inseminasi buatan di kabupaten sinjai belum sepenuhnya merata di setiap kecamatan hanya terfokus pada satu kecamatan saja padahal jika program ini tercapai dalam

setiap kecamatan yang ada di kabupaten sinjai dapat meningkatkan perekonomian masyarakat peternak terkhusus para peternak sapi hasil inseminasi apalagi nilai jual dari hasil sapi inseminasi buatan jauh lebih besar dibandingkan harga sapi lokal yang masih dikembangkan masyarakat sampai saat ini. Adapun jumlah peningkatan kelahiran pertahunnya sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Kelahiran Ternak Hasil Inseminasi Buatan (IB) Di Kabupaten Sinjai

No.	TAHUN	IB (Dosis)	AKSEPTOR	PKB			LAHIR			AUTS
				IB	KA	IB+KA	IB	KA	IB+KA	
1	2018	7,741	5,718	2,564	1,651	4,215	2,230	866	3,096	4630
2	2019	6,778	5,556	2,796	1,138	3,934	1,889	311	2,200	9,071
3	2020	6,341	5,073	3,461	2,039	5,500	2,661	878	3,539	9,263
4	2021	6,984	5,749	3,354	1,541	4,895	2,213	1791	4,004	8,249
5	2022	7,413	5,903	3,615	1,773	5,388	2,677	2,320	4,997	8,324
JUMLAH		35,257	27,999	15,790	8,142	23,932	11,670	6,166	17,836	39,537

Sumber: Dinas peternakan kabupaten sinjai tahun 2018-2023

Dengan melihat realita yang terjadi bahwa program inseminasi buatan di kabupaten sinjai belum sepenuhnya merata dalam proses implementasi program kebijakannya, oleh karena itu peneliti mengangkat judul “Implementasi Kebijakan Program Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dinas peternakan Kabupaten Sinjai dalam implementasi kebijakan program inseminasi buatan pada ternak sapi?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan program inseminasi buatan pada ternak sapi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Peternakan Kabupaten Sinjaidalam implementasi program inseminasi buatan di Kabupaten Sinjai
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi program kebijakan inseminasi buatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pemerintahan terutama kajian mengenai bagaimana strategi peran pemeritah daerah dalam implementasi kebijakan inseminasi buatan di Kabupaten Sinjai.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi bagi

masyarakat tentang peranan pemerintah daerah dalam implementasi inseminasi buatan, terkhusus bagi pemerintah daerah dalam hal ini terkait, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan dalam rangka upaya implementasi inseminasi buatan.

3. Manfaat Metodologis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah. Kemudian bisa di bandingkan dengan penelitian ilmiah lainnya, terutama yang mempelajari peranan pemerintah dalam implementasi kebijakan inseminasi buatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran Pemerintah Daerah

2.1.1 Peran

Peran berasal dari kata “peran” yang artinya, merupakan bagian dari atau memiliki pimpinan utama. Peranan atau *role* juga diartikan sebagai perilaku yang diharapkan seseorang dalam hubungan sosial tertentu yang berkaitan dengan status sosial tertentu. Peran merujuk pada kelompok yang kurang lebih berperilaku homogen, yang didefinisikan oleh norma dan diharapkan oleh warga dalam situasi sosial tertentu. Peran didasarkan pada persepsi dan ekspektasi peran, yang menjelaskan apa yang harus dilakukan individu dalam situasi tertentu untuk mencapai ekspektasi perannya atau ekspektasi lainnya.

Menurut Levinson (2002: 200) yang dikutip dalam Soedjono (2002: 200), peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh seorang individu, sangat penting bagi struktur sosial masyarakat, termasuk peran yang berkembang sesuai dengan status atau status individu. status dalam masyarakat Norma, dalam pengertian ini, peran adalah serangkaian aturan yang memandu kehidupan sosial masyarakat. Peran artinya, ketika seseorang memasuki komunitas dalam skala kecil (keluarga) dan skala besar (komunitas besar), setiap orang harus belajar memainkan peran tertentu.

Peran sosial yang perlu dikaji meliputi dua aspek, yaitu belajar memenuhi kewajiban dan menuntut hak dari peran tersebut, serta memiliki sikap, perasaan dan harapan yang sesuai dengan peran tersebut.

Merton dari Raton mengungkapkan bahwa peran diartikan sebagai cara berperilaku yang diharapkan masyarakat terhadap seseorang untuk mengambil posisi atau posisi tertentu (Raho, 2007: 67). Oleh karena itu, peran adalah keutuhan hubungan yang terbentuk akibat peran individu dalam status sosial masyarakat.

Scott dkk. Dalam Kanfer, dia menyebutkan lima aspek penting dari peran tersebut, sebagai berikut:

- 1) Peran adalah impersonal, posisi peran itu sendiri akan menentukan ekspektasi, bukan individu
- 2) Peran terkait dengan perilaku kinerja (*task behavior*), yang diharapkan dalam pekerjaan tertentu
- 3) Peran sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
- 4) Dapat mempelajari peran dengan cepat, dan dapat menyebabkan beberapa perubahan perilaku yang besar
- 5) Peran non-kerja (*jobs*) tidak sama, dan orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan dapat memainkan peran ganda (Kanfer, 1987: 197).

2.1.2 Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah sekumpulan orang yang mengatur kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pengembangan masyarakat pada lembaga tempatnya berada. Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk memelihara sistem ketertiban sosial dan memungkinkan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang normal. Dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya permintaan, maka peran pemerintah pun berubah menjadi melayani masyarakat. Intinya, pemerintahan modern adalah pelayanan kepada masyarakat. Pembentukan pemerintahan bukan untuk melayani diri sendiri tetapi, untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi agar setiap anggota dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya sendiri-sendiri untuk mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2011: 13).

Osborne dan Geabler yang dikutip oleh Rasyid (2011: 19) mengemukakan bahwa pemerintahan yang demokratis lahir untuk melayani warga negara, karena tugas pemerintah adalah mencari cara untuk menyenangkan warga negara. Oleh karena itu, pemerintahan dapat dilihat dari banyak aspek penting, seperti kegiatan struktur fungsional dan tanggungjawab yang berwenang. Kegiatan pemerintahan melibatkan semua kegiatan yang diselenggarakan berdasarkan kedaulatan dan landasan negara, yang melibatkan rakyat dan negara serta tujuan bernegara. Struktur fungsional memperlakukan pemerintah

sebagai seperangkat fungsi nasional yang saling terkait. Untuk memainkan peran dan menjalankan fungsinya atas dasar tertentu untuk tujuan negara. Pada saat yang sama, tanggung jawab dan wewenang terkait dengan tanggung jawab dan kewenangan nasional secara keseluruhan yang dijalankan oleh pemerintah.

Hal lain tentang C.F Strong adalah bahwa pemerintah daerah adalah organisasi yang menjalankan kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Secara garis besar, pemerintah lebih besar dari pada institusi atau organisasi. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara kesatuan Indonesia terbagi atas daerah setingkat provinsi dan daerah setingkat provinsi yang terbagi atas kabupaten dan kota.

Kemudian, pada Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan pemerintahan nasional dan mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus keluarganya sendiri. Kewenangan mengawasi dan mengurus keluarga meliputi tiga isipokok: Pertama, menyelesaikan

penugasan dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua, memberi kepercayaan dan kekuatan untuk berpikir, berinisiatif untuk bertindak dan menentukan cara untuk menyelesaikan tugas; ketiga, berpikir keras, berinisiatif dan mengambil keputusan, melibatkan masyarakat secara langsung, dan berpartisipasi bersama DPRD.

Bintoro Tjokroamidjojo dalam bukunya Pengantar Ilmu administrasi Pembangunan menyebutkan pula peranan dan fungsi pemerintah sebagai berikut: Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa hal; Pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan politik masyarakat. Ada negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakatnya untuk menumbuh-kembangkan masyarakat sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat. Pada masa lampau dalam bentuk yang ekstrem, hal ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan *Laissez Faire* namun, ada pula negara yang filsafat hidupnya menghendaki negara dan pemerintah memimpinserta mengurus segala sesuatu dalam kehidupan masyarakatnya, seperti filsafat politik tradisional.

Hal ini berkaitan dengan suatu pandangan bahwa pemerintah sebagai pemegang mandat untuk mengusahakan kepentingan dan keadilan dalam masyarakat secara keseluruhan. Ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan ekonomi lemah. Tugas

pokok pemerintah dari berbagai ahli :

1) Fungsi Pelayanan

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di semua sektor. Masyarakat tak akan dapat berdiri sendiri memenuhi kebutuhan tanpa adanya pemerintah yang memberikan pelayanan. Ini merupakan fungsi yang bersifat umum dan dilakukan oleh seluruh negara di dunia.

2) Fungsi Pengaturan

Pemerintah memiliki fungsi pengaturan (*regulating*) untuk mengatur seluruh sektor dengan kebijakan-kebijakan dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya. Maksud dari fungsi ini adalah agar stabilitas negara terjaga, dan pertumbuhan negara sesuai yang diinginkan.

3) Fungsi Pembangunan

Fungsi pembangunan dijalankan apabila kondisi masyarakat melemah dan pembangunan akan dikontrol ketika kondisi masyarakat membaik (menuju taraf yang lebih sejahtera). Negara-negara terbelakang dan berkembang menjalankan fungsi ini lebih gencar daripada negara maju.

4) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi ini dijalankan jika masyarakat tidak mempunyai *skill* dan kemampuan untuk bisa keluar dari *comfort zone* atau zona

aman. Contohnya masyarakat bodoh, miskin, tertindas, dan sebagainya. Pemerintah wajib mampu membawa masyarakat keluar dari zona ini dengan cara melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan dimaksud agar dapat mengeluarkan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sehingga tidak menjadi beban pemerintah. Pemberdayaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM atau masyarakat. Ketergantungan terhadap pemerintahan akan semakin berkurang dengan pemberdayaan masyarakat. Sehingga hal ini akan mempermudah pemerintah mencapai tujuan negara.

2.2 Implementasi Kebijakan Program Inseminasi Buatan pada Ternak Sapi di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Timur

2.2.1 Implementasi

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna jadi implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Berikut ini adalah beberapa pengertian tentang implementasi menurut para ahli. Menurut Nurdin Usman Implementasi adalah “bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Menurut Hanifah yang telah dikutip oleh Harsono telah mengemukakan pendapatnya implementasi adalah “suatu proses untuk melaksanakan kegiatan

menjadi tindakan kebijakan dari politik kedalam administrasi”.

Pengembangan suatu kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Guntur Setiawan mengemukakan pendapatnya implementasi adalah “perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”. Secara garis besar pengertian dari implementasi adalah suatu proses, suatu aktivitas yang digunakan untuk mentransfer ide atau gagasan, program atau harapan-harapan yang dituangkan dalam bentuk kurikulum desain (tertulis) agar dilaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Masing-masing pendekatan itu mencerminkan tingkat pelaksanaan yang berbeda.

Dalam kaitannya dengan pendekatan yang dimaksud, Nurdin menjelaskan bahwa pendekatan pertama, menggambarkan implementasi itu dilakukan sebelum penyebaran (desiminasi) kurikulum desain. Kata proses dalam pendekatan ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan penjelasan tujuan program, mendeskripsikan sumber-sumber baru dan memaparkan metode pengajaran yang digunakan. Pendekatan kedua, menekankan pada fase penyempurnaan Kata proses dalam pendekatan ini lebih menekankan pada interaksi antara pengembang dan guru (praktisi pendidikan). Pengembang melakukan pemeriksaan pada program baru yang direncanakan, sumber-sumber baru, dan

memasukkan isi atau materi baru ke program yang sudah ada berdasarkan hasil uji coba di lapangan dan pengalaman-pengalaman guru. Interaksi antara pengembang dan guru terjadi dalam rangka penyempurnaan program, pengembang mengadakan lokakarya atau diskusi-diskusi dengan guru-guru untuk memperoleh masukan. Implementasi dianggap selesai manakala proses penyempurnaan program baru dipandang sudah lengkap. Pendekatan ketiga memandang implementasi sebagai bagian dari program kurikulum.

Dari pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh obyek berikutnya yaitu kurikulum.

2.2.2 Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok, sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman

tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Carl Friedrich, kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan-tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

2.2.3 Program

Program adalah kumpulan-kumpulan instruksi dalam bentuk Bahasa, kode skema, maupun bentuk lain dimana apabila dijadikan satu dengan media yang bisa dibaca oleh computer akan mampu membuat computer bekerja untuk melakukan fungsi khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut

2.2.4 Inseminasi buatan

Dalam rangka menjamin bibit ternak sesuai standar, maka perlu melakukan pengawasan bibit ternak, agar bibit yang diproduksi dan diedarkan terjamin mutunya sehingga dapat memberikan perlindungan kepada konsumen dari bibit yang tidak memenuhi standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2014. tentang pengawasan produksi dan peredaran benih dan bibit hewan, pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB) pada ternak merupakan salah satu upaya penerapan teknologi tepat guna yang merupakan pilihan utama untuk peningkatan populasi dan mutu genetik sapi, maka dari itu menindak lanjuti aturan

menteri diatas dibuatkan aturan tentang peraturan bupati sinjai nomor 77 tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi dinas peternakan dan kesehatan hewan. Melalui kegiatan IB, penyebaran bibit unggul ternak sapi dapat dilakukan dengan murah, mudah dan cepat, serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan para peternak.

Inseminasi Buatan (IB) adalah salah satu teknologi reproduksi yang mampu dan telah berhasil untuk meningkatkan perbaikan mutu genetik ternak, sehingga dalam waktu pendek dapat menghasilkan anak dengan kualitas baik dalam jumlah yang besar dengan memanfaatkan pejantan unggul sebanyak- banyaknya.

Inseminasi Buatan ini sangat kontras dengan keberhasilan Transfer Embrio didalam perbaikan mutu 21rogeny. Perbaikan mutu 21rogeny menggunakan IB pada sapi perah dapat digunakan sebagai 21rogeny tes untuk menghasilkan pejantan unggul yang dapat dimanfaatkan menghasilkan spermatozoa salah satunya berdasar pada seleksi ukuran testisnya. Secara umum IB berfungsi untuk :

- 1) Perbaikan mutu

genetic Perbaikan Mutu Genetik Ternak merupakan suatu system yang mempelajari tentang mutu genetik ternak dan metode peningkatan mutu genetik ternak dalam skala populasi dengan tujuan akhir memperoleh populasi ternak dengan mutu genetik yang tinggi berdasarkan suatu sifat yang ekonomis tertentu.

2) Pencegahan penyakit menular

Bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi, dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu

3) Rekording lebih akurat

4) Biaya lebih murah

5) Mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh pejantan.

Inseminasi buatan adalah teknik reproduksi bantuan yang bertujuan untuk membantu sperma mencapai rahim/saluran indung telur dengan cara memasukkan sperma langsung ke dalam rahim/saluran indung telur pada masa ovulasi betina, melalui kateter kecil, sehingga membantu terjadinya pembuahan yang berujung dengan kehamilan. Sekitar 2 minggu sesudah dilakukan inseminasi, maka akan dilakukan tes kebuntingan untuk mengetahui keberhasilan inseminasi.

Inseminasi buatan yaitu proses sengaja untuk memasukkan sel sperma ke dalam rahim atau serviks betina dengan tujuan mendapatkan kehamilan yang wajar melalui inseminasi selain dengan cara berhubungan secara seksual.

Menurut pendapat para ahli, Toelihere (1993) beberapa keuntungan IB antara lain menghemat biaya pemeliharaan pejantan sehingga penambahan jumlah betina dapat dilakukan oleh peternak sebab peternak tidak harus memelihara pejantan, efisiensi reproduksi akan lebih baik.

Menuurut Ismaya (1999) bahwa dengan menggunakan IB,

peternak mendapatkan bibit yang unggul serta memperoleh keturunan yang cepat besar disamping tinggi produksinya.

Sugoro I (2009) menyatakan bahwa dalam upaya pengembangan inseminasi buatan, pemerintah menempuh dua kebijakan, yaitu ekstensifikasi dan intensifikasi. Pengembangan inseminasi buatan secara ekstensifikasi menitikberatkan pada peningkatan populasi ternak yang didukung oleh pengadaan dan peningkatan mutu bibit, penanggulangan penyakit, penyuluhan dan pembinaan usaha, bantuan perkreditan, pengadaan dan peningkatan mutu pakan, dan pemasaran.

Menurut Feradis (2010), penyuluhan dan pembinaan terhadap petani-peternak dilakukan untuk mengubah cara beternak dari pola tradisional menjadi usaha ternak komersial dengan menerapkan caracara zooteknik yang baik. Zooteknik tersebut termasuk sapta usaha beternak sapi, yang meliputi penggunaan bibit unggul, perkandangan yang sehat, penyediaan dan pemberian pakan yang cukup nutrien, pengendalian terhadap penyakit, pengelolaan reproduksi, pengelolaan pascapanen, dan pemasaran hasil yang baik.

Menurut Model David C. Korten harus meliputi tigaindikator yang disebutnya dengan model kesesuaian melalui pendekatan proses pembelajaran. David C. Korten menitikberatkan model ini pada tiga indikator kesesuaian yakni program itu sendiri, pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

David C. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program:

1) Program

Kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran.

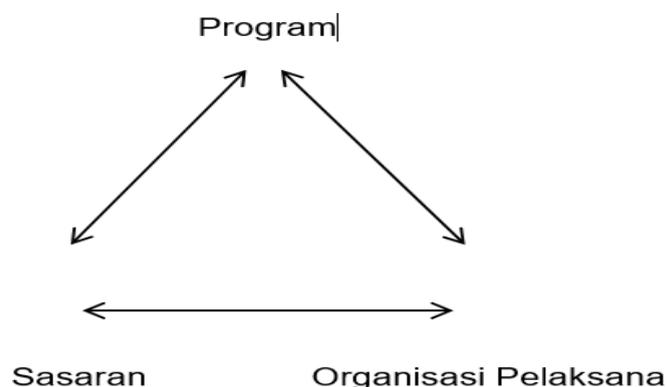
2) Organisasi Pelaksana

Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

3) Sasaran

Kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Gambar 2.2. 1 Model David C. Korten



Sumber: Haedar Akib dan Antonius Taringan

Berdasarkan pola yang dikembangkan David C. Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi program. Hal ini disebabkan apabila hasil program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, maka jelas hasil tidak dapat dimanfaatkan atau memberdayakan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan hasil program dengan tepat. Atau, jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan hasil program. Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi program mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

2.3 Kerangka Konsep

